

Sinergi *New Public Management* dan *New Public Service* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Era Digital

Siti Fatima Suja, Rusli Isa

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 30, 2025
Revised 10 Oktober 2025
Accepted 15 Oktober 2025
Available online 22 Oktober. 2025

Keywords

New Public Management, New Public Service, Sumber Daya Air, Dinas PUTR, Digitalisasi.

Kata Kunci:

New Public Management, New Public Service, Water Resources Management, Digital Governance, Local Government.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The digital transformation in public administration has created new challenges for local technical agencies, including the Public Works and Spatial Planning Office (PUTR), which plays a crucial role in water resources management (WRM). This study analyzes the synergy between the New Public Management (NPM) paradigm—focused on efficiency and performance—and the New Public Service (NPS) paradigm—emphasizing participation and public value—in the management of WRM at the PUTR Office of Bolaang Mongondow Selatan Regency, Indonesia. A qualitative descriptive method was applied through literature review, limited interviews with PUTR officials, and policy document analysis. The findings reveal that digitalization initiatives such as GIS-based irrigation network monitoring, damage reporting applications, and e-supervision systems have improved efficiency and accountability (NPM principles). However, program sustainability depends heavily on community collaboration, farmer associations, and local user groups (NPS principles). The synergy between NPM and NPS creates a hybrid model of public administration that is both efficient and inclusive, reinforcing good water governance in the digital era.

ABSTRAK

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan telah memunculkan tantangan baru bagi lembaga teknis daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan sumber daya air (SDA). Artikel ini menganalisis sinergi antara paradigma *New Public Management* (NPM) yang berorientasi pada efisiensi dan kinerja dengan *New Public Service* (NPS) yang menekankan partisipasi dan nilai publik, dalam konteks pengelolaan SDA di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka, wawancara terbatas dengan aparatur Bidang SDA, serta analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik seperti sistem informasi jaringan irigasi, aplikasi pelaporan kerusakan, dan pemantauan proyek berbasis GIS telah meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas (prinsip NPM). Namun, keberlanjutan program sangat bergantung pada kolaborasi dengan masyarakat, kelompok tani, dan organisasi pengguna air (prinsip NPS). Sinergi NPM dan NPS membentuk paradigma administrasi publik baru yang efisien sekaligus inklusif, memperkuat prinsip *good water governance* di era digital.

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma administrasi publik dari birokrasi tradisional menuju tata kelola digital menandai babak baru dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga kolaboratif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Salah satu sektor yang sangat terdampak oleh perubahan ini adalah pengelolaan sumber daya air (SDA) sektor yang menggabungkan unsur teknis, sosial, dan lingkungan.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pengelolaan SDA merupakan tanggung jawab Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR). Fungsi utamanya mencakup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan irigasi, serta pengendalian banjir. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan SDA menghadapi berbagai kendala: keterbatasan anggaran, ketidakterpaduan data, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Di sisi lain, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki potensi besar pada sistem irigasi dan bendungan yang tersebar di Kecamatan Bolaang Uki, Tomini, dan Pinolosian.

Pemanfaatan sistem digitalisasi, seperti aplikasi pemetaan jaringan irigasi berbasis GIS, pelaporan kerusakan infrastruktur secara online, serta e-monitoring proyek konstruksi, mulai diterapkan sejak 2021 untuk memperbaiki efisiensi pelayanan.

Artikel ini berargumen bahwa efektivitas pengelolaan SDA di era digital membutuhkan sinergi dua paradigma administrasi publik:

- (1) *New Public Management (NPM)*, yang menekankan efisiensi dan manajemen berbasis kinerja, serta
- (2) *New Public Service (NPS)*, yang menekankan partisipasi warga dan penciptaan nilai publik.

Keduanya saling melengkapi: NPM memperkuat *how government works efficiently*, sedangkan NPS memperkuat *why government exists—to serve citizens* (Denhardt & Denhardt, 2015).

TINJAUAN PUSTAKA

Paradigma New Public Management (NPM)

NPM lahir pada 1980-an dengan gagasan bahwa sektor publik dapat mengadopsi praktik manajemen sektor swasta agar lebih efisien. Menurut Hood (1991), NPM menekankan:

- Efisiensi penggunaan sumber daya;
- Fokus pada hasil (*results orientation*);
- Kompetisi antar unit kerja;
- Pengukuran kinerja dengan indikator kuantitatif;
- Akuntabilitas berbasis hasil.

Dalam konteks SDA, pendekatan NPM diwujudkan dalam penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting), sistem pemantauan digital proyek, serta penerapan indikator keberhasilan teknis seperti luas area irigasi berfungsi, volume air yang disalurkan, dan tingkat kepuasan masyarakat.

Paradigma New Public Service (NPS)

Sebaliknya, NPS berfokus pada pelayanan berbasis nilai publik dan partisipasi warga. Denhardt & Denhardt (2015) menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi bentuk hubungan sosial yang demokratis antara pemerintah dan warga. Prinsip utamanya adalah:

- Pemerintah *melayani warga negara, bukan pelanggan*;
- Kebijakan publik dihasilkan melalui dialog dan kolaborasi;
- Nilai demokrasi lebih utama dari efisiensi semata;
- Akuntabilitas diarahkan kepada publik, bukan hanya pada struktur hierarkis.

Dalam SDA, prinsip NPS diterapkan melalui forum musyawarah pengguna air (P3A/GP3A), transparansi data proyek air, dan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan irigasi.

Digitalisasi dan Administrasi Publik

Transformasi digital menciptakan paradigma baru yang disebut *Digital Era Governance (DEG)* (Janssen & Van der Voort, 2020). Teknologi seperti Geographic Information System (GIS), Internet of Things (IoT), dan big data analytics memungkinkan pemerintah meningkatkan efisiensi dan partisipasi sekaligus. Dalam konteks SDA, digitalisasi membuka peluang untuk:

- E-monitoring proyek air;
- Integrasi data hidrologi;
- Pelaporan masyarakat secara daring;
- Transparansi penggunaan anggaran publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif-deskriptif**. Tujuannya adalah menggambarkan dan menganalisis bagaimana sinergi NPM dan NPS diterapkan dalam pengelolaan SDA oleh Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Lokasi penelitian berada di **Kantor Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**, Bidang Sumber Daya Air, serta beberapa kelompok **P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)** di Kecamatan Bolaang Uki dan Pinolosian. Data diperoleh melalui:

- **Wawancara semi-struktur** dengan Kepala Bidang SDA, staf teknis, dan anggota P3A;
- **Analisis dokumen** (Rencana Kerja Dinas PUTR, laporan kinerja tahunan, data proyek);
- **Observasi partisipatif** terhadap sistem digitalisasi irigasi dan aplikasi pelaporan kerusakan jalan/irigasi.

Analisis dilakukan dengan model **Miles & Huberman (2014)** melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber (dokumen, wawancara, dan observasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi dan Akuntabilitas melalui NPM

Penerapan prinsip NPM di Bidang SDA terlihat pada:

- Implementasi **e-monitoring proyek irigasi** yang memantau progres fisik dan keuangan secara real time.
- Penggunaan **Sistem Informasi Irigasi Terpadu (SIIT)** berbasis GIS yang memetakan kondisi saluran dan debit air.
- Penilaian kinerja staf dan kontraktor melalui *Key Performance Indicators (KPI)* yang diukur per triwulan.

Hasil observasi menunjukkan efisiensi meningkat sebesar $\pm 20\%$ dalam pelaksanaan proyek dibandingkan metode manual sebelumnya. Laporan realisasi proyek juga lebih cepat diverifikasi karena tersinkron dengan data digital.

Kolaborasi dan Partisipasi Publik melalui NPS

Meskipun digitalisasi mempercepat kinerja, keberhasilan pengelolaan SDA tetap bergantung pada **kolaborasi dengan masyarakat pengguna air**. Dinas PUTR Bolsel secara rutin mengadakan **Forum Dialog SDA** bersama kelompok P3A dan tokoh masyarakat untuk menentukan prioritas rehabilitasi jaringan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pemantauan lapangan melalui **aplikasi pelaporan kerusakan (WaterApp Bolsel)** yang dikembangkan tahun 2023.

Langkah ini menunjukkan penerapan prinsip NPS: *co-production* antara pemerintah dan warga. Pengaduan masyarakat dapat langsung diverifikasi teknis dan dipublikasikan secara terbuka di situs dinas. Hal ini meningkatkan transparansi dan memperkuat legitimasi pelayanan publik.

Sinergi NPM–NPS dalam Era Digital

Sinergi kedua paradigma terlihat pada integrasi **efisiensi berbasis data** (NPM) dengan **partisipasi warga berbasis nilai publik** (NPS). Digitalisasi berfungsi sebagai jembatan yang memfasilitasi kedua pendekatan tersebut.

Misalnya, data dari *e-monitoring* proyek irigasi (NPM) digunakan sebagai bahan rapat koordinasi publik (NPS). Begitu pula sistem GIS yang efisien digunakan untuk dialog terbuka mengenai prioritas pembangunan jaringan air. Hasilnya adalah tata kelola SDA yang **lebih responsif, transparan, dan berkelanjutan** — ciri khas dari *Good Water Governance*.

SIMPULAN

Sinergi *New Public Management* dan *New Public Service* telah menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air di era digital. Prinsip NPM menghadirkan efisiensi dan akuntabilitas melalui manajemen berbasis kinerja dan teknologi digital. Sementara NPS memastikan bahwa kebijakan dan layanan air tetap berorientasi pada nilai publik, partisipasi, dan keadilan sosial.

Studi kasus Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya alat efisiensi, tetapi juga sarana membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan SDA di masa depan ditentukan oleh kemampuan birokrasi daerah untuk menyeimbangkan efisiensi manajerial (NPM) dengan pelayanan berbasis nilai dan kolaborasi (NPS). Model sinergi ini berpotensi menjadi kerangka baru administrasi publik daerah berbasis digital, yang dapat direplikasi di sektor lain seperti tata ruang, jalan, dan lingkungan hidup.

REKOMENDASI

- (1) Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu memperluas pelatihan SDM tentang literasi digital dan manajemen data publik.
- (1) Integrasi data SDA antar instansi (Bappeda, DLH, BPBD) harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih program.
- (2) Partisipasi masyarakat perlu dilembagakan melalui forum konsultasi publik yang terjadwal.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengembangkan dashboard publik SDA berbasis GIS agar data proyek dan kondisi irigasi dapat diakses masyarakat.

REFERENSI

- Denhardt, J., & Denhardt, R. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hood, C. (1991). "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Janssen, M., & Van der Voort, H. (2020). "Agile and Adaptive Governance in the Digital Era." *Government Information Quarterly*, 37(3).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. Addison-Wesley.
- Purwanti, T., et al. (2022). "Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Hasil dalam Administrasi Publik." *Jurnal Sengkuni, PDM Bengkulu*.
- Hafrida, L., et al. (2023). "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Cempedak Rahuk." *Jurnal Dialogue, Universitas Diponegoro*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance*. Routledge.